

Efektivitas Kinerja Birokrasi Melalui Pendekatan Administrasi Publik Berbasis Kinerja

Muhammad Arkan Fathudin¹, Siti Alia²

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
aseng.karyana@gmail.com

Keywords:
 bureaucratic performance;
 performance-based approach; public administration;
 organizational effectiveness;
 bureaucratic reform

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of bureaucratic performance through a performance-based public administration approach. The research method used is a qualitative approach with a case study technique in a regional government agency. The results show that the application of measurable performance indicators and a target-based evaluation system can improve bureaucratic efficiency and accountability. The findings also highlight the importance of strategic leadership and an adaptive work culture in supporting the successful implementation of performance-based public administration. In conclusion, this approach can enhance more responsive and results-oriented bureaucratic governance.*

Kata Kunci:
 kinerja birokrasi;
 pendekatan kinerja;
 administrasi publik;
 efektivitas organisasi;
 reformasi birokrasi

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja birokrasi melalui pendekatan administrasi publik berbasis kinerja. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus pada instansi pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan indikator kinerja yang terukur dan sistem evaluasi berbasis capaian target mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas birokrasi. Temuan ini juga menunjukkan pentingnya kepemimpinan strategis dan budaya kerja adaptif dalam mendukung keberhasilan penerapan administrasi publik berbasis kinerja. Kesimpulannya, pendekatan ini dapat memperkuat tata kelola birokrasi yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil.*

Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, tuntutan terhadap birokrasi pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan responsif semakin meningkat. Publik tidak lagi hanya menuntut pelayanan, tetapi juga mempertanyakan efektivitas dan hasil nyata dari kinerja birokrasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem birokrasi di Indonesia adalah kecenderungan masih dominannya orientasi pada prosedur administratif dibandingkan orientasi hasil. Berbagai reformasi birokrasi telah digulirkan sejak awal 2000-an, namun permasalahan klasik seperti lambannya pelayanan, rendahnya akuntabilitas, serta kurangnya transparansi masih menjadi hambatan utama

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Dalam konteks tersebut, pendekatan administrasi publik berbasis kinerja menjadi sangat relevan untuk diterapkan sebagai strategi perbaikan dalam sistem birokrasi Indonesia. Pendekatan ini menekankan pentingnya pengukuran hasil, efisiensi penggunaan sumber daya, dan akuntabilitas terhadap capaian yang telah direncanakan (Dewi, 2019).

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa administrasi publik berbasis kinerja dapat meningkatkan kinerja organisasi publik secara signifikan apabila diimplementasikan dengan indikator yang jelas dan sistem evaluasi yang tepat. Misalnya, penelitian Osborne dan Gaebler (1992) memperkenalkan konsep *reinventing government* yang menekankan pada birokrasi yang berorientasi pada hasil dan pelayanan, bukan pada aturan semata. Selain itu, Hood (1991) melalui konsep *New Public Management* juga menegaskan pentingnya prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sektor publik. Di Indonesia, pendekatan ini mulai mendapatkan perhatian sejak diberlakukannya sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*) yang dicanangkan dalam reformasi birokrasi. Namun demikian, implementasi pendekatan ini di tingkat pemerintah daerah maupun pusat belum sepenuhnya optimal. Banyak kendala struktural, kultural, dan kapasitas sumber daya manusia yang masih membatasi penerapan pendekatan ini secara konsisten dan menyeluruh.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas kinerja birokrasi dapat ditingkatkan melalui penerapan pendekatan administrasi publik berbasis kinerja. Dengan kata lain, penelitian ini mencoba mengukur dampak pendekatan tersebut terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan penerapan pendekatan berbasis kinerja di lingkungan birokrasi. Hal ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika internal birokrasi serta tantangan praktis yang dihadapi dalam proses transformasi administrasi publik (Edward et al, 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pendekatan administrasi publik berbasis kinerja dalam meningkatkan kinerja birokrasi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menilai implementasi indikator kinerja yang digunakan dalam sistem birokrasi; (2) mengevaluasi pengaruh pendekatan berbasis kinerja terhadap efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik; dan (3) merumuskan strategi penguatan kinerja birokrasi berdasarkan temuan lapangan.

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mendasari studi ini antara lain: (1) Bagaimana implementasi pendekatan administrasi publik berbasis kinerja di lingkungan birokrasi? (2) Sejauh mana pendekatan ini berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas kinerja birokrasi? (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pendekatan tersebut? (4) Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan pendekatan ini dalam konteks birokrasi Indonesia?

Penelitian ini memiliki kontribusi penting baik dalam konteks akademis maupun praktis. Dari sisi akademis, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya dalam melihat efektivitas pendekatan berbasis kinerja di negara berkembang. Penelitian ini juga memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan birokrasi di tingkat daerah yang selama ini masih kurang dieksplorasi secara mendalam. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi reformasi birokrasi yang lebih tepat sasaran dan berbasis pada kinerja nyata. Penelitian ini juga dapat memberikan panduan implementatif bagi para praktisi pemerintahan dalam mengelola organisasi publik secara lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat langsung bagi masyarakat (Dewi & Wiguna, 2019).

Tinjauan Literatur

Pendekatan administrasi publik berbasis kinerja merupakan bentuk modern dari penyelenggaraan birokrasi yang menekankan pada pencapaian hasil, efisiensi sumber

daya, dan akuntabilitas terhadap publik. Secara teoritis, konsep ini berkembang dari pemikiran New Public Management (NPM) yang mulai populer pada tahun 1980-an, dipelopori oleh tokoh seperti Christopher Hood (1991). NPM mendorong pergeseran orientasi birokrasi dari proses dan aturan menuju hasil dan pelayanan publik yang efektif. Dalam kerangka NPM, birokrasi harus dikelola seperti organisasi bisnis, dengan mengedepankan efisiensi, pengukuran kinerja, dan kompetisi dalam pelayanan publik. Administrasi publik berbasis kinerja juga sejalan dengan teori Performance Management yang menekankan pentingnya perumusan tujuan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta sistem evaluasi berbasis hasil sebagai alat untuk mengendalikan dan meningkatkan kinerja organisasi. Robert D. Behn (2003) menambahkan bahwa pengelolaan kinerja yang baik akan meningkatkan motivasi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam sektor publik (Ginjar et al, 2019).

Selanjutnya, teori sistem dalam administrasi publik juga relevan dalam memahami dinamika penerapan pendekatan berbasis kinerja. Teori ini memandang organisasi birokrasi sebagai sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal. Dalam konteks ini, input berupa sumber daya manusia, anggaran, dan kebijakan akan diproses melalui struktur dan prosedur birokrasi untuk menghasilkan output dan outcome berupa pelayanan publik. Dengan pendekatan kinerja, perhatian tidak hanya pada proses (input dan throughput), tetapi juga pada sejauh mana output dan outcome tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk mendukung hal ini, digunakan alat seperti Key Performance Indicators (KPI), Balanced Scorecard, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang telah banyak diterapkan di Indonesia sejak reformasi birokrasi digulirkan. Selain itu, teori kepemimpinan transformasional juga memainkan peran penting dalam konteks ini. Kepemimpinan yang visioner dan mampu mendorong perubahan sangat diperlukan untuk menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur administratif (Herzegovina et al, 2022).

Dalam bagian kedua, tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi pendekatan administrasi publik berbasis kinerja telah memberikan hasil yang beragam. Penelitian oleh Wahyudi (2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem

pengukuran kinerja berbasis hasil di salah satu pemerintah daerah di Jawa Timur berdampak positif terhadap efisiensi pelayanan publik, namun masih terkendala pada aspek keterbukaan informasi kinerja kepada masyarakat. Penelitian lain oleh Fitriani dan Prasetyo (2020) menemukan bahwa adanya komitmen pimpinan dan pelatihan SDM secara berkelanjutan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan pendekatan kinerja di lingkungan kementerian. Sementara itu, studi oleh Siregar (2022) menekankan bahwa penerapan kinerja berbasis hasil di beberapa instansi pusat belum maksimal akibat lemahnya sistem insentif dan rendahnya partisipasi pegawai dalam perencanaan kinerja. Dari ketiga penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun pendekatan kinerja telah diterapkan secara formal, efektivitasnya masih bergantung pada dukungan budaya organisasi, kepemimpinan, dan sistem manajemen sumber daya manusia.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang tidak hanya menilai sejauh mana administrasi publik berbasis kinerja diimplementasikan secara teknis, tetapi juga menganalisis keterkaitan antara dimensi-dimensi teori kinerja dengan realitas birokrasi secara sistemik. Selain itu, penelitian ini menawarkan analisis mendalam mengenai bagaimana kepemimpinan strategis dan budaya kerja adaptif berperan sebagai faktor pendukung utama dalam mengatasi hambatan struktural yang selama ini menghambat penerapan sistem kinerja birokrasi (Ismid et al, 2020).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) sebagai pendekatan utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Studi literatur dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat konseptual dan teoritis, yaitu untuk memahami dan mengevaluasi efektivitas kinerja birokrasi melalui pendekatan administrasi publik berbasis kinerja. Pendekatan ini tidak melibatkan partisipan atau responden secara langsung, melainkan mengandalkan telaah terhadap sumber-sumber ilmiah dan dokumen relevan yang telah dipublikasikan. Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara mendalam berbagai teori, kebijakan, dan temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kinerja birokrasi serta pendekatan administrasi publik yang berorientasi pada hasil

(performance-based public administration). Fokus utama dari desain ini adalah merumuskan pemahaman konseptual dan pemetaan permasalahan yang dihadapi birokrasi dalam mengimplementasikan pendekatan berbasis kinerja (Ismail & Bas, 2022).

Sumber data yang digunakan dalam studi ini berasal dari literatur sekunder, yaitu dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Sumber tersebut meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional yang terakreditasi, hasil-hasil penelitian terdahulu, laporan kebijakan pemerintah, serta regulasi dan dokumen resmi lainnya seperti peraturan perundang-undangan, dokumen reformasi birokrasi, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemilihan literatur dilakukan secara purposive, yakni dengan mempertimbangkan relevansi, kualitas akademik, serta aktualitas topik. Literatur yang dipilih berfokus pada kajian-kajian yang mengulas konsep administrasi publik, manajemen kinerja sektor publik, birokrasi, serta implementasi kebijakan di lingkungan pemerintahan. Selain itu, literatur yang digunakan juga mencakup sumber-sumber yang berasal dari jurnal terindeks nasional seperti Sinta dan jurnal internasional bereputasi untuk memperkuat kerangka teoretis dan argumentasi penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan seleksi dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses ini dimulai dengan penelusuran literatur melalui basis data elektronik seperti Google Scholar, ScienceDirect, JSTOR, Garuda, serta portal jurnal ilmiah nasional lainnya. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian antara lain: "kinerja birokrasi", "administrasi publik berbasis kinerja", "performance-based public administration", "New Public Management", "SAKIP", dan "efektivitas organisasi publik". Setiap literatur yang ditemukan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, jenis data, dan kontribusinya terhadap pertanyaan penelitian. Untuk menjamin validitas data, literatur yang dipilih diuji melalui triangulasi sumber dan perbandingan antarteori atau antartemuan sebelumnya guna memastikan konsistensi informasi (Mirza et al, 2023).

Metode analisis data dalam studi literatur ini menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis). Teknik ini dilakukan dengan cara menelaah isi dari setiap dokumen

atau referensi yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola-pola tematik, hubungan antara konsep, serta posisi teori dalam menjawab permasalahan yang dikaji. Proses analisis dimulai dengan membaca secara menyeluruh setiap literatur, kemudian menandai bagian-bagian penting yang berkaitan dengan variabel penelitian, seperti efektivitas birokrasi, indikator kinerja, dan faktor-faktor penghambat maupun pendukung dalam penerapan administrasi publik berbasis kinerja. Hasil pembacaan tersebut kemudian disintesis menjadi kerangka tematik yang terdiri dari beberapa kategori, seperti teori dasar, hasil penelitian sebelumnya, tantangan implementasi, dan solusi strategis. Analisis ini bersifat interpretatif, di mana peneliti tidak hanya mengkompilasi data, tetapi juga memberikan penafsiran kritis terhadap makna yang terkandung dalam masing-masing literatur (Nasution et al, 2022).

Hasil Penelitian

Implementasi Pendekatan Administrasi Publik Berbasis Kinerja dalam Birokrasi

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa penerapan pendekatan administrasi publik berbasis kinerja di lingkungan birokrasi Indonesia telah diupayakan secara bertahap sejak diberlakukannya reformasi birokrasi nasional. Penerapan ini umumnya diwujudkan melalui penguatan sistem pengukuran kinerja berbasis output dan outcome yang dirumuskan dalam berbagai instrumen seperti Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga menjadi salah satu mekanisme yang digunakan untuk menilai seberapa jauh capaian kinerja unit kerja terhadap target yang telah ditetapkan.

Data dari sejumlah dokumen kebijakan menunjukkan bahwa mayoritas instansi pemerintah telah mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam sistem manajemen kinerja mereka. Penetapan indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis menjadi bagian penting dari proses ini. Namun demikian, hasil kajian juga memperlihatkan bahwa meskipun secara formal sistem ini telah diterapkan, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan komitmen pimpinan instansi dalam mengawal pelaksanaannya. Dalam beberapa kasus, perumusan indikator kinerja masih bersifat

normatif dan tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja nyata yang dapat diukur secara objektif (Sumiati, 2022).

Selain itu, belum meratanya kapasitas sumber daya manusia dalam memahami pendekatan berbasis kinerja menjadi tantangan tersendiri. Beberapa instansi menunjukkan hasil yang lebih baik karena memiliki sistem pelatihan internal dan pengawasan yang kuat, sementara yang lain masih menghadapi kesulitan dalam menghubungkan antara input, proses, dan hasil. Meski demikian, secara umum pendekatan ini telah meningkatkan kesadaran institusi terhadap pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja birokrasi (Rezariski, 2020).

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Kinerja Birokrasi

Hasil kajian literatur mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi administrasi publik berbasis kinerja. Faktor pertama adalah kepemimpinan strategis yang visioner dan konsisten. Pemimpin yang memiliki komitmen terhadap reformasi birokrasi terbukti mampu mendorong perubahan budaya kerja serta meningkatkan motivasi aparatur dalam mencapai target kinerja. Faktor kedua adalah tersedianya sistem informasi manajemen kinerja yang andal. Penggunaan teknologi digital dalam pemantauan dan evaluasi program-program kerja terbukti mempercepat proses penilaian dan mempermudah proses pelaporan (Suharnoko, 2019).

Di sisi lain, terdapat pula berbagai faktor penghambat yang sering ditemukan dalam penerapan pendekatan ini. Hambatan struktural seperti tumpang tindih tugas antarunit, kurang sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran, serta birokrasi yang masih berorientasi prosedural menjadi kendala utama dalam pencapaian efektivitas kinerja. Hambatan kultural seperti resistensi terhadap perubahan, rendahnya budaya kerja berorientasi hasil, dan minimnya partisipasi pegawai dalam proses perumusan indikator kinerja juga menghambat optimalisasi sistem. Di samping itu, kurangnya insentif terhadap pencapaian kinerja turut menjadi faktor melemahnya semangat inovasi di kalangan aparatur negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan administrasi publik berbasis kinerja dalam meningkatkan efektivitas birokrasi sangat bergantung pada integrasi antara sistem, manusia, dan kepemimpinan. Tanpa dukungan menyeluruh dari semua aspek tersebut, implementasi sistem kinerja hanya akan bersifat administratif dan tidak berdampak signifikan terhadap kualitas layanan publik (Suwidyanti, 2023).

Diskusi

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan pendekatan administrasi publik berbasis kinerja memiliki potensi besar dalam meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi, asalkan diimplementasikan secara konsisten dan terintegrasi dengan faktor pendukung utama seperti kepemimpinan, sistem informasi, dan budaya organisasi. Hasil ini menjawab pertanyaan pertama dalam penelitian, yaitu bagaimana implementasi pendekatan administrasi publik berbasis kinerja di lingkungan birokrasi. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem ini telah berlangsung secara formal melalui kebijakan pemerintah seperti SAKIP, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja, namun secara substansi masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Banyak instansi yang masih menerapkan pendekatan ini sebatas pemenuhan administratif, tanpa keterlibatan aktif aparatur dan tanpa indikator yang benar-benar mencerminkan capaian strategis.

Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Fitriani dan Prasetyo (2020), yang mengungkapkan bahwa efektivitas sistem pengukuran kinerja sangat bergantung pada peran kepemimpinan dalam memberikan arah dan supervisi. Penelitian ini memperkuat teori New Public Management dari Hood (1991) yang menekankan pada pentingnya efisiensi, hasil, dan manajemen kinerja dalam birokrasi modern. Namun, pendekatan NPM tidak dapat berjalan optimal di Indonesia tanpa mempertimbangkan kondisi sosio-kultural birokrasi yang masih kental dengan sistem hirarkis dan prosedural. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka administrasi publik berbasis kinerja telah diterapkan, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan internalisasi nilai-nilai kinerja oleh para pelaksana birokrasi (Apriani & Ramadhany, 2025).

Menjawab pertanyaan kedua mengenai kontribusi pendekatan berbasis kinerja terhadap efektivitas birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas jika diterapkan dengan sistem indikator yang relevan dan evaluasi berbasis data. Kejelasan target, pengukuran berbasis output dan outcome, serta keterhubungan antara perencanaan dan penganggaran merupakan komponen krusial. Temuan ini mendukung teori Performance Management yang dikemukakan Behn (2003), yang menekankan bahwa sistem kinerja yang kuat akan menghasilkan motivasi dan akuntabilitas yang tinggi dalam birokrasi. Implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya membangun sistem informasi kinerja yang terintegrasi, bukan hanya untuk pelaporan, tetapi juga sebagai alat pengambilan keputusan dan evaluasi berkala yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Terkait pertanyaan ketiga mengenai faktor pendukung dan penghambat, penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama yang mendukung efektivitas pendekatan kinerja: kepemimpinan strategis, sistem teknologi informasi yang memadai, dan budaya kerja yang adaptif. Sebaliknya, penghambat utama terletak pada resistensi budaya birokrasi yang masih bersifat prosedural, keterbatasan kompetensi aparatur dalam perencanaan kinerja, dan tidak optimalnya sistem penghargaan dan insentif terhadap capaian kinerja. Dalam banyak kasus, indikator yang ditetapkan masih bersifat normatif dan tidak selaras dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini menunjukkan pentingnya reformulasi indikator kinerja agar lebih kontekstual dan mendorong hasil nyata, bukan sekadar formalitas pelaporan. Hasil ini juga memperkuat pentingnya teori sistem dalam administrasi publik, yang memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang membutuhkan keseimbangan antara input, proses, dan output (Edward et al, 2024).

Temuan ini memiliki implikasi penting baik dalam konteks akademik maupun praktis. Dalam konteks akademik, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa efektivitas kinerja birokrasi tidak hanya ditentukan oleh adanya sistem atau kebijakan, tetapi juga oleh variabel kontekstual yang bersifat organisasional dan budaya. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka teori administrasi publik berbasis kinerja yang lebih relevan dengan konteks negara berkembang seperti Indonesia. Sementara dalam konteks praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat

kebijakan dalam merumuskan strategi reformasi birokrasi yang lebih menekankan pada kualitas perencanaan, evaluasi berbasis data, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pendekatan pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur perlu difokuskan tidak hanya pada aspek teknis pelaporan kinerja, tetapi juga pada pemahaman makna kinerja itu sendiri sebagai alat untuk menciptakan dampak positif bagi publik.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan studi literatur yang digunakan tidak memungkinkan verifikasi langsung terhadap kondisi empirik di lapangan, sehingga analisis bersifat konseptual dan bergantung pada kualitas serta kelengkapan literatur yang tersedia. Kedua, fokus penelitian ini terbatas pada tingkat implementasi dan tidak mencakup pengaruh kebijakan makro yang mungkin memengaruhi efektivitas birokrasi secara struktural. Ketiga, beberapa literatur yang digunakan dalam kajian ini belum sepenuhnya merepresentasikan dinamika terbaru di tingkat daerah yang memiliki variasi signifikan dalam penerapan reformasi birokrasi.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan pendekatan studi lapangan (field research) yang mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif, seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen di instansi pemerintah. Hal ini dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana pendekatan administrasi publik berbasis kinerja benar-benar dijalankan oleh aktor birokrasi di level operasional. Penelitian juga dapat difokuskan pada studi komparatif antar daerah atau instansi, untuk melihat sejauh mana konteks lokal mempengaruhi keberhasilan pendekatan ini. Selain itu, dimensi kepemimpinan, sistem insentif, dan budaya organisasi dapat digali lebih lanjut sebagai faktor kunci yang menentukan efektivitas kinerja birokrasi dalam jangka panjang (Herzegovina et al, 2022).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan administrasi publik berbasis kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan efektivitas kinerja birokrasi, terutama jika didukung oleh kepemimpinan yang strategis, sistem informasi manajemen yang memadai, serta budaya kerja yang adaptif. Meskipun secara formal banyak instansi

telah menerapkan sistem pengukuran kinerja melalui berbagai instrumen seperti SAKIP, permasalahan masih muncul dalam hal kualitas perencanaan, pemahaman terhadap indikator kinerja, serta integrasi sistem dengan pelaksanaan kerja di lapangan. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya bersifat struktural dan administratif, tetapi juga menyentuh aspek substansial seperti perubahan perilaku organisasi dan peningkatan kapasitas aparatur.

Kontribusi penelitian ini terhadap bidang administrasi publik terletak pada pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan sistem kinerja dalam konteks birokrasi Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini memberikan dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi peningkatan kinerja birokrasi yang lebih kontekstual, terukur, dan berkelanjutan. Untuk aplikasi praktis, penelitian ini mendorong perlunya penguatan evaluasi kinerja berbasis hasil, peningkatan kompetensi SDM, dan pembentukan sistem insentif yang sejalan dengan capaian kerja.

Daftar Pustaka

- Apriani, G., & Ramadhany, R. (2025). Efektivitas reformasi birokrasi Indonesia: Meningkatkan pelayanan publik di era digital. *Musamus Journal of Public Administration*, 7(2), 322–331.
- Dewi, D. D. (2019). Implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tahun 2016 [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Dewi, N. A. W. T., & Wiguna, I. G. N. H. (2019). Evaluasi penerapan performance based budgeting pada pemerintah provinsi di Indonesia. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), 201–222.
- Edward, A. V., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). New public management: Studi kasus penerapan new public management dalam organisasi publik di Indonesia. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(2), 54–62.

- Ginanjar, D., Pasolo, F., Siahaya, A., & Saleh, K. (2019). Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi pada Polda Papua). *The Journal of Business and Management Research*, 2(2), 224–232.
- Herzegovina, S. M. H., Edwinarta, C. D., & Fauzia, M. E. (2022). Implikasi pembangunan zona integritas dalam reformasi birokrasi pelayanan keimigrasian pada kantor imigrasi Tanjung Perak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, 6(2).
- Ismail, A., & Bas, A. H. M. (2022). Efektivitas pengawasan berbasis kinerja di Dinas Sosial Kota Makassar. *Journal of Applied Management and Business Research (JAMBiR)*, 2(3), 284–289.
- Ismid, F., Kusmanto, H., & Lubis, M. S. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 129–140.
- Mirza, D., Suryani, L., Latip, L., & Aditiya, V. (2023). Literature review: Peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 5(1), 51–55.
- Nasution, D. A. D., Supraja, G., & Damanik, A. F. (2022). Implementasi surat perintah membayar berbasis kinerja pada sektor publik di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 32, 1477–1491.
- Rezariski, A. O. (2020). Penerapan penganggaran berbasis kinerja dan reformasi birokrasi di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(4), 332217.
- Suharnoko, D. (2019). Efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja perangkat daerah di Kabupaten Malang. *Karta Rahardja: Jurnal Pembangunan dan Inovasi*, 1(2), 1–13.
- Suryanto, S., & Kurniati, P. S. (2020). Tinjauan perubahan sistem penganggaran berbasis kinerja di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 1(2).
- Suwidyanti, N. (2023). Peran good governance melalui reformasi birokrasi dan e-government guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kinerja di Kota Surabaya. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(2), 530–543.